

KOMITMEN 15.

PERLUASAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS DAN AKSESIBEL DI INDONESIA

INSTITUSI PENGUSUL: 1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), 3. Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan 4. Yayasan Layanan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)		
KATEGORI USULAN: MELANJUTKAN		
USULAN PROGRAM		
Stakeholder Pelaksana:	:	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 3. Mahkamah Agung (MA)
Judul Komitmen:	:	Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	:	Dalam praktik pemberian bantuan hukum, masih ditemui berbagai kendala seperti misalnya masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui apa itu bantuan hukum, sensitivitas pemberi bantuan hukum yang belum optimal, standar pemberian layanan yang masih belum seragam, dan sebagainya. Berbagai hambatan ini cenderung berimplikasi pada keengganan masyarakat untuk menggunakan bantuan hukum ketika mengalami masalah hukum. Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019 menunjukkan bahwa 64% masyarakat yang memiliki masalah hukum cenderung untuk tidak menggunakan bantuan hukum—dengan alasan khawatir prosesnya berbelit-belit. ¹ Hal ini mengindikasikan 2 (dua) hal yaitu

¹ Dio Ashar Wicaksana, dkk., Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 (Jakarta: IJRS, 2020), hlm. 91

Usulan Komitmen OGI 2023-2024
Organisasi Masyarakat Sipil
WG Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

		adanya pengetahuan yang masih minim tentang bantuan hukum dan adanya pandangan yang negatif terhadap bantuan hukum oleh masyarakat. Dalam menanggapi berbagai hambatan tersebut, pada tahun 2021 lalu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum). Adanya standar ini dapat dikatakan merupakan capaian yang sangat baik dan berkontribusi pada pencapaian Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) periode 2018-2020 lalu—di mana organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari PBHI, YLBHI, IJRS dan lain-lain berkolaborasi bersama BPHN untuk penyusunan standar ini. Namun sayangnya, pedoman ini masih belum dilengkapi dengan pedoman turunan yang mengatur secara lebih teknis standar layanan seperti apa yang harus diterapkan oleh pemberi bantuan hukum. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memastikan adanya portal informasi terkait bantuan hukum yang sudah ada sejak 2016 dan pada tahun 2021 diupayakan untuk bersinergi dengan Mahkamah Agung.² Namun, portal informasi ini juga belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, untuk meningkatkan pemberian bantuan hukum yang berkualitas dan aksesibel, penguatan terhadap Starla Bankum dan penguatan portal informasi bantuan perlu dilakukan.
Apa bentuk komitmennya	:	Mendorong pedoman teknis dan implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum untuk pemberi bantuan hukum

² Seknas OGI, Lapora Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional OGI Tahun 2020-2022 Semester I (B06) - Komitmen 7 (Jakarta: Seknas OGI, 2022), hlm. 19

Usulan Komitmen OGI 2023-2024
Organisasi Masyarakat Sipil
WG Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik	:	Adanya pedoman yang lebih teknis dalam Standar Layanan Bantuan Hukum dapat memudahkan implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum yang telah ada. Dengan diimplementasikannya Standar Layanan Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum dapat memperoleh bantuan hukum yang lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan hukum yang berkualitas dapat mendorong adanya pandangan yang lebih positif dari masyarakat terhadap bantuan hukum sehingga akses masyarakat terhadap bantuan hukum dapat lebih dimaksimalkan dan optimal.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	:	Adanya Pedoman Starla Bankum ini juga sekaligus menjadi implementasi dari prinsip Open Government Indonesia, khususnya prinsip partisipatif dan inklusif. Dengan memastikan adanya bantuan hukum yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat merupakan bentuk upaya untuk menjamin partisipasi dan inklusivitas pemberian layanan bantuan hukum oleh seluruh pencari keadilan. Hal ini dapat menjadi langkah awal dalam upaya menjamin kesetaraan hukum dan pemenuhan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	Komitmen ini sekaligus memiliki relevansi dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam salah satu agenda pembangunan yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik di mana salah satu targetnya adalah terwujudnya pemenuhan akses terhadap keadilan. Di mana salah satu strateginya adalah penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang

Usulan Komitmen OGI 2023-2024
Organisasi Masyarakat Sipil
WG Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

		berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan. Strategi lainnya yang relevan adalah pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum. Komitmen ini juga akan mendukung SDGs Goal 16.3 yakni mendorong negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua.	
Penerima Manfaat	:	Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Advokat, pencari keadilan	
Informasi Tambahan	:	-	
Sumber Dana Pengusul:	:	Belum ada, namun akan diupayakan kerjasama dengan mitra pembangunan	
Indikator Capaian dengan Target Terukur	:	Waktu Mulai	Waktu Berakhir
Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan pedoman dari Starla Bankum		Januari 2023	Desember 2024
Adanya pelaksanaan Sosialisasi terkait Pedoman Starla Bankum		Januari 2023	Desember 2024

Usulan Komitmen OGI 2023-2024
Organisasi Masyarakat Sipil
WG Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

Adanya kajian terhadap portal informasi terkait bantuan hukum		Januari 2023	Desember 2024
Informasi Kontak			
Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	:	Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS)	
Departemen / Jabatan	:		
Email	:	seknas@pbhi.or.id / office@ijrs.or.id	
Nomor Handphone	:		